

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebencanaan di Indonesia masih mengalami dinamika kewenangan yang saling tumpang tindih didalam birokrasi. Implementasi pelayanan publik dalam kebencanaan oleh pemerintah hingga sekarang masih memiliki masalah yang ada mengingat pemerintah mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Tetapi realistasnya implementasi pelayanan publik oleh pemerintah yang diselenggarakan belum mampu dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kata lain pelayanan yang diberikan birokrasi dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat masih belum dapat memuaskan masyarakat sebagai tujuan implementasi pelayanan publik. Berbagai dimensi implementasi pelayanan publik masih memiliki titik lemah birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik mulai dari peraturan, kelembagaan, dan tata pelaksana yang hingga saat ini masih penting terus dilakukan pembenahan baik dari regulasi maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Terlebih koordinasi antar lembaga pusat maupun daerah dalam penanganan kebencanaan yang saling terkait dalam menjalankan tugas pokok beserta fungsinya masih harus dilakukan pembenahan secara terstruktur. Faktanya implementasi pelayanan publik di masyarakat dalam hal koordinasi antar lembaga masih menjadi penghambat berjalannya birokrasi pemerintah. Demikian terjadi juga pada birokrasi pemerintah dalam penanganan kebencanaan nasional maupun daerah, ketika implementasi program atau kegiatan melibatkan beberapa lembaga terkait dengan struktur pengelolaan sampai pelaksanaan program sering menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan kegiatan.

Paham akan posisi sebagai Negara yang memiliki julukan “Ring of Fire” atau wilayah yang sering terjadi bencana gunung meletus dan gempa bumi mengakibatkan Indonesia harus mempunyai strategi untuk menghadapi kejadian tersebut. Di Indonesia pada umumnya daerah dengan wilayah rawan bencana alam disetiap daerah yang terjadi tentu tidak mengenal waktu. Gunung meletus menjadi bencana yang sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Banyak gunung berapi di Indonesia yang masih aktif dari tahun terdahulu sampai tahun sekarang. Potensi bencana yang dimiliki gunung berapi terbagi menjadi dua jenis yaitu potensi bahaya utama yang berpengaruh secara langsung (primer) dan potensi bahaya ikutan yang tidak berpengaruh secara langsung. Salah satu prioritas dalam upaya PRB (Pengurangan Risiko Bencana) adalah pentingnya menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan disemua tingkat (dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membangun kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat). Mitigasi bencana adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif kejadian bencana terhadap kehidupan atau dapat diartikan bahwa mitigasi sebagai mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya terjadi¹. Mitigasi bencana termasuk titik tolak utama dari manajemen penanggulangan bencana. Dengan mitigasi dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan. Mitigasi juga upaya tindakan pencegahan bencana. Pencegahan bencana termasuk serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Identifikasi kawasan rawan

¹ Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. *Manajemen Bencana* (Malang: Alfabeta, 2013), hlm.22

bencana salah satu kegiatan dalam mitigasi bencana. Karena dalam kegiatan identifikasi kawasan rawan bencana dilakukan² :

1. Identifikasi sumber bencana dan memetakannya, terutama di wilayah dan/atau kawasan yang sudah menunjukkan ciri-ciri perkotaan dan/atau terbangun.
2. Mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar/kecilnya ancaman bencana dan dampak bencana yang ditimbulkan (tipologi bahaya).
3. Menginformasikan tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing tipologi bahaya.

Aktivitas-aktivitas ini yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam rangka menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang yang berwawasan mitigasi bencana. Proses mitigasi bencana tidak mungkin langsung menjadi sesuatu yang instan. Manajemen Bencana (Disaster Management) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana serta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana³. Namun perlu adanya upaya dari birokrasi dalam hal ini pemerintah untuk mensinergikan antar stakeholder untuk mewujudkannya dalam bentuk implementasi kebijakan yang sesuai dengan strategi manajemen bencana. Dalam kondisi ini peran stakeholders terkait sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program yang akan dijalankan. Beberapa diantaranya sangat central yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai aktor negara dituntut untuk hadir memberikan perlindungan guna meminimalisir terjadinya dampak korban jiwa dan materi dengan membuat keputusan pemerintah mulai dari membuat kebijakan publik tentang kebencanaan untuk mengikat orang banyak yang dibuat oleh pemegang otoritas atau mandat publik. Strategi pemerintah dalam penanggulangan bencana mulai dengan tahap mitigasi

² Tandobala Linda. (2011). "Pemahaman tentang kawasan rawan bencana dan tinjauan terhadap kebijakan dan peraturan terkait". Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol.3. hal.3

³ Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. *Manajemen Bencana* (Malang: Alfabeta, 2013), hlm.42

terhadap suatu bencana yang terjadi. Selanjutnya pihak swasta sendiri berperan sebagai yang menyediakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Peran terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang menjadi target berjalannya program yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan atau pemerintahnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat ikut serta dalam setiap kebijakan yang telah dibuat seperti ikut dalam pemilihan umum dan kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan ikut serta memutuskan kebijakan apabila ada suatu permasalahan dengan cara musyawarah mufakat. Selain itu, peran masyarakat bisa juga ditunjukkan dengan memberikan dukungan terhadap pemerintah. Dengan catatan bahwa dukungan yang diberikan masyarakat dalam bentuk dukungan atas kebijakan publik yang bersifat positif dan tidak merugikan semua pihak. Dukungan ini diperlukan untuk lebih memperkuat fungsi dan tujuan dari kebijakan tersebut agar dapat terimplementasi dengan baik.

Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Pasal 8 tentang penanggulangan terhadap suatu bencana yang terjadi di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Penanggulangan bencana tidak lain karena peristiwa bencana yang mengerikan pada tahun 2004 di Aceh. Pada saat terjadinya bencana di Aceh pemerintah belum adanya upaya pencegahan dini terhadap bencana yang menghantam. Hasilnya banyak korban jiwa, materi dan kerusakan lingkungan akibat dari kejadian luar biasa tersebut. Pemerintah merasakan teguran keras dari peristiwa tahun 2004 tersebut. Langkah pemerintah kedepannya membuat lembaga kebencanaan sesuai amanat dari Undang-Undang terakait kebencanaan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 dengan tujuan membentuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk menangani penanggulangan bencana dalam skala nasional, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk menangani penanggulangan bencana skala daerah.

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sendiri mempunyai fungsi Perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh⁴. Sedangkan untuk tugas dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yaitu Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat⁵. Tentunya dibawah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terdapat lembaga penanggulangan bencana untuk tingkat daerah yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana. Guna menyikapi tentang keadaan tersebut penanganan bencana terbagi tiga fase penanganan yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, dan penanganan pasca bencana.

Karakteristik ekonomi sosial masyarakat lereng Gunung Merapi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 115.834⁶ tinggal dikawasan rawan bencana. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan (kesuburan tanah dan ketersediaan air) dan faktor sosial ekonomi (pembangunan infrastruktur, pengembangan wisata, telekomunikasi dan sistem air tawar. Masyarakat disekitaran lereng merapi sangat rentan karena berbagai beberapa alasan, yaitu *pertama*, faktor kerentanan sosial ekonomi yaitu secara umum wilayah lereng gunung api merupakan wilayah pedesaan dengan persawahan merupakan penutup utama lahan,

⁴ Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008

⁵ Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008

⁶ BPS Kabupten Magelang 2020

diikuti oleh permukiman, padang rumput, dan lahan kering. Mayoritas lahan di wilayah Gunung Aji Merapi dieksploitasi oleh penduduk sekitarnya, kecuali lereng-lereng curam yang ditutupi oleh hutan. Lahan permukiman khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Masyarakat lereng gunung menganggap bahwa hubungan antara lingkungan vulkanik dan kehidupan sosial mereka sangat kuat. Gunung Merapi dianggap sebagai tempat suci yang menawarkan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam sangat penting untuk mata pencaharian masyarakat lokal karena mayoritas masyarakat yang tinggal di lereng Merapi adalah petani, penambang pasir, dan peternak. *Kedua*, faktor kerentanan sosiokultural yaitu kepercayaan tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat setempat dengan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap gunung api dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menghadapi bencana. Di sekitar Gunung Merapi, keyakinan agama terpengaruh budaya animisme, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Pengaruh tersebut tercermin dari banyaknya orang yang berpikir bahwa kerugian aktual dan potensial yang terkait dengan letusan gunung Merapi merupakan hal yang *divine* (takdir).

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Sebelum terbentuknya BPBD tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana khususnya oleh Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Bidang Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, telah dilantik pejabat struktural pada BPBD tanggal 22 Oktober 2011 dan mulai tanggal tersebut. BPBD Kabupaten Magelang telah berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. BPBD kabupaten Magelang tentunya mempunyai tugas diantaranya menetapkan

pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana⁷. Sedangkan untuk fungsi dari BPBD Kabupaten Magelang yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya⁸.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menanggulangi bencana di daerah. Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja penanggulangan bencana di daerah kabupaten magelang yang meliputi pada tahap pra bencana, bencana, dan pasca bencana. Hal ini didasari letak geografis kabupaten magelang yang berdekatan langsung dengan Gunung Merapi yang masih aktif dengan sebutan Gunung Merapi. Masyarakat setempat dituntut berusaha untuk menyesuaikan diri pada kondisi ketika terjadi gunung meletus. Tidak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk hadir dimasyarakat lereng gunung merapi. Meskipun selalu terdampak bencana, sepertinya belum ada upaya maksimal dalam hal mitigasi bencana dari pemerintah. Mitigasi atau upaya mengurangi jumlah korban dan tingkat

⁷ Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011

⁸ Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011

kerugian memang terasa masih belum mengalami peningkatan secara signifikan. Minimnya perbaikan pada mitigasi bencana ini disinyalir berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran pemerintah mengenai kebencanaan. Pemerintah belum menaruh perhatian yang lebih serius pada urusan ini. Ini dapat dilihat dari minimnya anggaran, rendahnya kualitas teknologi, dan minimnya pendidikan kesiapsiagaan bencana. Beragam perbaikan memang telah dilakukan, tetapi penurunan risiko tetap tidak berubah signifikan. Dengan beragam risiko bencana alam yang nyata, pemerintah seharusnya menyiapkan program mitigasi yang ideal sehingga dapat menekan resiko. Meski munculnya bencana tak dapat diduga, Negara maupun tingkat daerah tetap wajib mengupayakan minimalisasi angka korban dan kerugian. Kenyataannya kesadaran pemerintah terhadap urgensi hal-hal tersebut masih belum nampak. Beragam keterbatasan menyebabkan akurasi keputusan kerap terhambat pada saat terjadi bencana. Koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam mitigasi bencana. Hal ini berakibat pada kebijakan yang dikeluarkan akhirnya bersifat parsial. Hal ini misalnya dapat dilihat pada tidak adanya koordinasi antara data seismik BMKG dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas melakukan pembangunan fisik. Penyebab lain dari rendahnya kesiapsiagaan bencana adalah rendahnya prioritas pemerintah daerah terhadap kebencanaan. Banyak kabupaten/kota yang belum memasukkan anggaran adaptasi dan mitigasi bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mereka. Rata-rata anggaran penanganan bencana di daerah hanya 0,02-0,07 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan pengalaman berharga bagi masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana dapat diartikan sebagai kondisi atau karakteristik geologis, biologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu dengan meminimalisir resiko yang didapatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang secara keseluruhan haruslah mengupayakan intervensi terhadap kerentanan wilayah dan meningkatkan kondisi ketahanan ruang wilayah terhadap kemungkinan adanya bahaya bencana yang akan terjadi. Gunung Merapi dikategorikan sebagai Gunung Api yang sangat aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus. Jenis potensi bahaya Gunung Merapi dapat mengancam keselamatan manusia dan harta benda, terdiri atas awan panas, hujan abu lebat, lontaran batu (pijar) dan lahar, sedangkan lava jarang mencapai lereng bawah yang berpenduduk, jadi tidak membahayakan.

Modifikasi sistem kebencanaan perlu dilakukan sebelumnya pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang masyarakat harapkan. Hal ini tentunya perlu melalui proses awal dari tahapan modifikasi system kebencanaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Proses awal tahapan modifikasi bencana dimulai dengan tahapan konseptual yaitu kondisi dimana sebagian besar proses kegiatan difokuskan pada identifikasi pengorganisasian data spesifik kebencanaan yang sudah ada beserta analisis kebutuhan di masa mendatang. Selain itu juga dilakukan pengawasan untuk kelayakan berupa estimasi biaya dan potensi manfaat yang bakal diperoleh ketika kejadian bencana. Tahapan kedua berupa pengembangan operasional yang dimana pada tahapan ini dilakukan akuisisi sistem, akuisisi basisdata, pengorganisasian sistem, persiapan prosedur operasi, dan persiapan lokasi kebencanaan. Melalui akuisisi sistem diharapkan dapat dipilih Langkah yang paling efektif dengan biaya serendah mungkin meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pengorganisasian sistem, kendala yang seringkali dihadapi adalah kebutuhan dan kesadaran pihak pendukung keberhasilan system kebencanaan. Persiapan prosedur pelaksanaan menyangkut penentuan manajemen sistem, seperti operasi harian, pemeliharaan

peralatan, serta pengalokasian wewenang system kebencanaan. Selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi pada setiap periode tertentu. Keberadaan sistem sebaiknya ditinjau kembali untuk memonitor relevansinya. Jika hasil pelaksanaan dilapangan menunjukkan adanya pergeseran sistem dari tujuan semula, maka diperlukan perbaikan dan atau perluasan sistem kebencanaan (*system disaster expansion*). Dengan adanya langkah modifikasi system kebencanaan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas implementasi system kebencanaan untuk hal yang lain terkait nantinya ketika terjadi suatu jenis bencana yang lain. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dibagi dalam tiga tingkatan dari terjauh sampai terdekat berturut-turut yaitu kawasan rawan bencana satu, kawasan rawan bencana dua, dan kawasan rawan bencana tiga yang merupakan peta daerah yang ditetapkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Magelang⁹.

Erupsi terbesar dalam jangka waktu 100 tahun terakhir ini membuat masyarakat terkejut dan panik ketakutan serta memunculkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan pengungsian. Pasca erupsi, BPBD Kabupaten Magelang melakukan gerakan penjaringan aspirasi dari masyarakat terkait kejadian pengelolaan pengungsian. Penjaringan aspirasi tersebut menggunakan metode tiga plano yang berarti metode perencanaan partisipatif yang berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kondisi ideal yang diinginkan masyarakat serta strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pasca erupsi dan terjadi erupsi berikutnya. Berdasarkan metode tersebut, diketahui bahwa beberapa masalah pengelolaan pengungsian yang dihadapi oleh masyarakat sebagaimana tuliskan kertas PLANO yang terdapat tiga bagian diantaranya sebagai berikut PLANO Pertama¹⁰ :

⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi

¹⁰ Estuning Tyas dkk, *Sister Village ; Strategi Alternatif Mitigasi Bencana Gunung Api* (Yogyakarta:UGM Press 2019), hal 32-34.

1. Warga satu desa terpisah-pisah diberbagai tempat pengungsiannya. Hal ini menyulitkan kepala desa untuk mengelola warganya, sehingga para kepala desa diprotes karena tidak mau mengurus warganya di pengungsian. Pada kenyataannya, kepala desa bukan bermaksud tidak mau mengurus warga di pengungsian, tetapi karena tidak tahu dimana lokasi pengungsian, ditambah lagi dengan kondisi hujan abu yang berlangsung beberapa hari yang menyebabkan kepala desa kesulitan mencari lokasi pengungsian warga.
2. Antar anggota keluarga saling terpisah, anak terpisah dengan orang tuanya, istri terpisah dengan suaminya, yang semuanya mengakibatkan trauma selama di pengungsian.
3. Pengelolaan bantuan kepada pengungsi mengalami kesulitan yang disebabkan oleh data pengungsi yang selalu berubah-ubah setiap saat dan bercampur antara warga desa satu dengan desa lainnya.

Pada diskusi selanjutnya, BPBD Kabupaten Magelang menanyakan kepada masyarakat tentang kebutuhan di pengungsian tercukupi yang hasilnya masyarakat tidak hanya diberikan oleh pemerintah namn juga datang dari masyarakat yang jauh dari rawan bencana yang peduli, relawan, perguruan tinggi, tentara, polisi, perusahaan swasta, dan sebagainya. Akhirnya memunculkan PLANO Kedua adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kebutuhan pengungsi dan kembali ke rumah jika situasi sudah aman harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang peduli.

Selanjutnya masyarakat menuliskan cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar kondisi yang diinginkan (kondisi ideal) tersebut tercapai, antara lain dengan memunculkan PLANO Ketiga adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memberikan peringatan dini yang cepat dan akurat.

2. Pemerintah harus menyiapkan saran dan prasarana evakuasi yang cukup dan tertata (jalan evakuasi, kendaraan evakuasi, dan tempat evakuasi/pengungsian yang lengkap).
3. Pemerintah harus menyiapkan pos kesehatan di setiap pengungsian.
4. Pemerintah harus menyiapkan segala kebutuhan pengungsi.

Dengan kondisi latar belakang permasalahan seperti itu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magelang melalui BPBD Kabupaten Magelang membuat program dengan nama *Sister Village* atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan “Paseso” (Paseduluran Deso). Sistem *sister village* merupakan hasil dari modifikasi model baru *disaster management* yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2013 oleh BPBD Kabupaten Magelang dengan membuat jalinan kerja sama antara desa kawasan rawan bencana dengan desa yang jauh dari ancaman bencana gunung meletus. Program *Sister Villange* ini sedikit banyak mengadopsi kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Magelang pada zaman dahulu. Dimana ketika terjadi gunung meletus masyarakat desa yang terkena langsung gunung meletus dapat mengungsi ke desa yang sudah di tentukan oleh BPBD Kabupaten Magelang. Sehingga pada saat terjadinya gunung meletus masyarakat yang akan dievakuasi oleh pihak tim penanggulangan bencana tidak menimbulkan kekacauan saat proses evakuasi bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan konteks yang telah diuraikan diatas, maka ringkasan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Sister Village* dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan *Sister Village* dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi *Sister Village* Sebagai Usaha Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021 :

1. Mengidentifikasi implementasi *sister village* yang terjadi pada BPBD Kabupaten Magelang.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi pada implementasi *sister village* di BPBD Kabupaten Magelang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis :

a. Kegunaan Akademik

Untuk menambah wawasan informasi bagi pembaca Mengenai Implementasi *sister village* Sebagai Usaha Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi bagi peneliti lain terkait pengaruh dibuatnya *sister village* terhadap Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021 dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang disaster management bagi penulis maupun pembaca serta mampu memberikan pandangan publik tentang *disester management* dalam upaya penanggulangan Gunung Meletus.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, adalah suatu kajian untuk penelitian terdahulu mencakup konsep ide dan gagasan yang sama dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu untuk penelitian ini digunakan

sebagai acuan dasar untuk memunculkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Dalam kaitannya, penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak jauh keberadaannya dengan permasalahan pelaksanaa *sister village* dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Merapi pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Magelang.

Pertama, penelitian terdahulu terkait penelitian yang sama dengan studi ini pernah dilakukan oleh Willybrodus Gabriel Kristifolus mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2017 dengan judul Analisis Implementasi *Sister Village* Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi Dalam Status Aktif Normal (Pra Bencana) di Kabupaten Magelang Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung dengan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan *sister village* mampu menjadi solusi dari kekacauan yang timbul akibat penanganan erupsi Merapi tahun 2010. Melalui *sister village* menjadi lebih terorganisir, karena warga sudah tahu harus mengungsi kemana dan bagi pemerintah desa lebih mudah untuk menjangkau karena tujuan pengungsian sudah jelas. Namun masih terdapat kendala dalam implementasi *sister village* terutama infrastruktur posko penampungan yang belum mampu menjangkau seluruh pengungsi. Bahkan untuk ternak juga masih dibutuhkan infrastruktur tambahan. Selain itu konflik horisontal antar warga desa pengungsi dan desa penyangga apabila tidak dikelola dengan baik justru menghabiskan energi para relawan pengungsian¹¹.

Kedua, penelitian lainnya mengenai studi ini dilakukan oleh Evi Susanti dan Nurul Khotimah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Desa Mranggen. Penelitian ini berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat untuk mengetahui tingkat

¹¹ Willybrodus. Jurnal. *Analisis Implementasi Sister Village Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi Dalam Status Aktif Normal (Pra Bencana) di Kabupaten Magelang Desa Ngargomulyo dengan Desa Tamanagung* (2017)

keberhasilan program *sister village* dengan mendapatkan hasil kesimpulan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di KRB III Gunung Merapi Desa Mranggen, tergolong dalam tingkatan sedang yaitu dengan rata-rata skor nilai keseluruhan responden pada masing-masing tahapan partisipasi yang menunjukkan angka 22,64. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan responden dalam berbagai tahapan kegiatan mitigasi bencana bervariasi, sehingga masyarakat kurang aktif terutama dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non-struktural di Desa Mranggen¹².

Ketiga, penelitian lainnya mengenai permasalahan ini dilakukan oleh Rahayu Sri Hartati mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014 dengan judul Dampak Erupsi Gunung Merapi Terhadap Lahan dan Upaya-Upaya Pemulihannya. Peneliti berfokus pada bahaya primer dan sekunder yang dapat merusak lahan serta upaya pemulihan lahan yang dapat dilakukan dengan tata guna lahan dengan penghutanan kembali pada lahan yang terkena dampak erupsi gunung Merapi¹³.

Lebih mendalam lagi, masih banyak hasil kajian ilmiah erupsi bencana gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Peneliti akan mengambil beberapa penelitian sebagai acuan konsep permasalahan terhadap penelitian ilmiah ini. Persamaan yang muncul dari pembahasan ini dari ketiga penelitian dengan penelitian ini adalah pembahasan permasalahan terhadap erupsi bencana gunung Merapi.

Sedangkan perbedaan yang dapat dihasilkan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah; Pertama, dalam penelitian ini akan berfokus pada dalam suatu wilayah kerja BPBD Kabupaten Magelang saat terjadi bencana erupsi pada tahun 2021. Kedua, dibandingkan

¹² Susanti. Jurnal. *Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi (Studi Kasus: Desa Mranggen)* (2016)

¹³ Rahayu. Jurnal. *Dampak Erupsi Gunung Merapi Terhadap Lahan dan Upaya-Upaya Pemulihannya* (2014)

dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan berfokus pada kajian implementasi kebijakan *sister village* yang terjadi di wilayah kerja BPBD Kabupaten Magelang dengan menggunakan landasan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III dimana akan menganalisis dan menjelaskan data dalam lingkup permasalahan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi. Ketiga, dalam permasalahan ini juga akan dibahas apa saja faktor pendukung dan penghambat dari terlaksananya implementasi kebijakan *sister village* di Kabupaten Magelang

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan untuk menggabungkan para peneliti Generasi II yang menggunakan logika cara berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan klasifikasi ‘ke bawah’ untuk melihat tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini sering juga disebut ‘*policy-centered*’ karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak. Dalam interpretasi teori implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan *top-down* tujuan utamanya adalah¹⁴

“to identify the cause of implementation problems or failure and suggest ways of enhancing the likelihood of obtaining compliance with policy objectives, generally focused on strategies for improved communication of intentions, coordination of the ‘links in the chain’, management of resources and control implementing agents”.

Implementasi kebijakan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk bagaimana program tersebut dalam terlaksana atau dijalankan oleh pihak yang terlibat baik masyarakat maupun pejabat terkait. Beberapa langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik terdapat dua cara diantaranya dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

¹⁴ Barrett, 2008:253.

kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Terdapat beberapa model diantaranya model *top-down* diartikan implementasi diawali oleh pemerintah yang harus diikuti masyarakat. Model ini pada dasarnya mengikuti pendekatan preskriptif yang menafsirkan kebijakan sebagai input dan implementasi sebagai faktor output. Sedangkan model pendekatan implementasi kebijakan yang digagaskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*¹⁵. Proses implementasi ini merupakan salah satu contoh model *Top-Down*. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut George Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan public perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya dan disposisi dengan faktor penentu keberhasilan implementasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana implementasi kebijakan tetapi juga disampaikan kepada

¹⁵ Van Metter dan Van Horn dalam Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Hal 40

kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3) Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

1) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III juga menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not be effective”*

2) Sumber daya Anggaran menurut Edward III menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang

seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program dengan menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan itu secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III mengatakan bahwa :

“Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”.

4. Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi. *Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan

tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan¹⁶.

1.6.2 Disaster Manajemen

Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis *preventif* (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan¹⁷. Sedangkan Menurut Neil Grigg fase utama dan fungsi pengelolaan manajemen secara umum termasuk dalam manajemen/pengelolaan bencana, meliputi:

1. Perencanaan (*planning*), meliputi :

- (1) Identifikasi masalah bencana sasaran atau tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan.
- (2) Pengumpulan data primer dan sekunder.
- (3) Penentuan metode yang digunakan.
- (4) Investigasi, analisis atau kajian.
- (5) Penentuan solusi dengan berbagai alternatif.

Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan. Sedangkan, implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi.

2. Pengorganisasian (*organising*)

Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang (pihak) yang masuk dalam

¹⁶ Edward III, G.C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.

¹⁷ Carter W. Nick, *loc.cit*,

suatu kesatuan/kelompok organisasi dalam implementasi pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana.

3. Kepemimpinan (*directing*)

Lebih dominan ke aspek-aspek *leadership*, yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, *reward and punishment*, konselor, dan pelatihan. Kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan.

4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia (SDM) agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal yaitu antar bagian yang mempunyai kedudukan setara maupun vertikal yaitu antar suatu bagian di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan struktur yang ada. Dalam hal ini, koordinasi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang terlibat langsung ketika sebelum, saat dan sesudah bencana.

5. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sisi-sisi waktu (*time*), ruang (*space*), biaya (*cost*) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan

baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan atau bagian dari kegiatan itu bekerja, untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis dan atau darurat.

6. Pengawasan (*supervising*)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan sumber daya manusia bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya dan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, target dan sasaran dan juga berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar.

7. Penganggaran (*budgeting*)

Dalam hal pengelolaan bencana, penganggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada.

8. Keuangan (*financing*)

Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi atau organisasi sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program¹⁸.

¹⁸ Grigg, Neil, *Infrastructure Engineering and Management* (Jhon Willey & Sons, 1988)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Bagan 1.7 Operasionalisasi Konsep



1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang merupakan suatu produk hukum yang menjadi suatu kebijakan publik yang berlaku di Kabupaten Magelang hingga saat ini yang menjadikan dasar dalam penanggulangan bencana erupsi gunung Merapi pada saat permasalahan meletusnya gunung Merapi pada tahun 2010.
2. Fokus peneliti kemudian akan dilanjutkan dengan satuan kerja pemerintah Kabupaten Magelang yang berada pada BPBD Kabupaten Magelang yang menjadi implementor dari penanggulangan bencana alam.

3. Lebih fokus lagi, peneliti akan menjadikan prosesi kebijakan publik dalam kajian implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, Implementasi kebijakan publik merupakan tahap akhir pelaksanaan dari hasil pembuatan kebijakan oleh pemangku kebijakan yang memberikan regulasi mendalam bagi masyarakat.
4. Kaitannya dengan penelitian ini, keberhasilan dan permasalahan dari implementasi sister village dengan landasan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 akan dianalisis dengan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi secara detail dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan public menurut George Edward III yang menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi

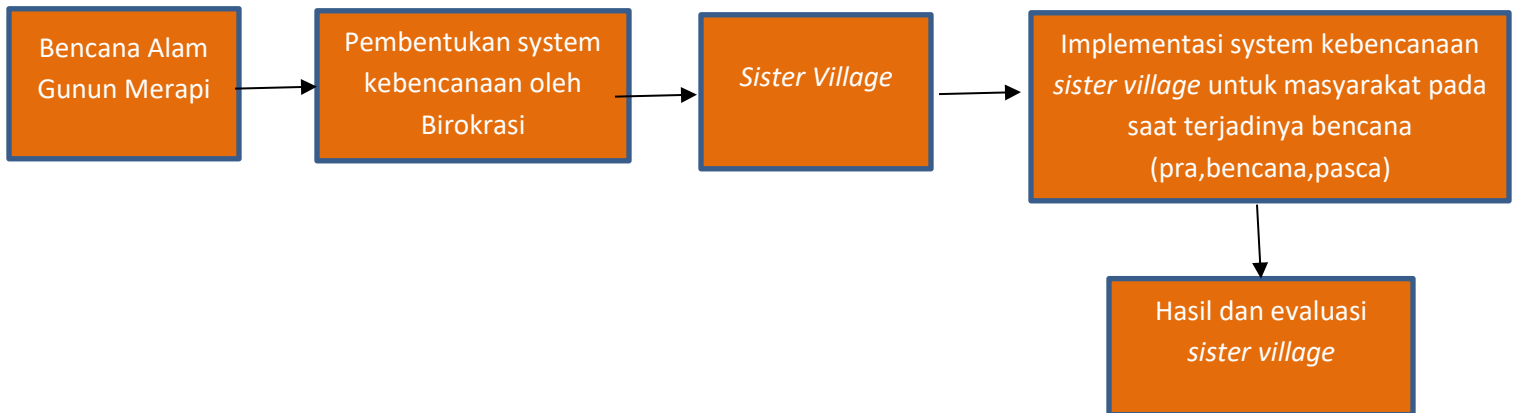
Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sister Village di Kabupaten Magelang

| No | Variable | Indikator | Sub Indikator |
|--|-------------|--|--|
| Implementasi Kebijakan Edward III | | | |
| 1. | Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat transmisi komunikasi dalam BPBD Kabupaten Magelang 2. Adanya kejelasan komunikasi antara pelaksana dan pengguna 3. Terjalannya konsistensi komunikasi yang dijalankan untuk keberlanjutan program sister village. |
| 2. | Sumber Daya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 3. Sumber Daya Anggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sumber daya manusia yang mendukung posisi masing-masing dalam sister village. 2. Mempunya cukup fasilitas yang memadai dari pelaksanaan sister village 3. Keseterediaan anggaran yang cukup memadai baik dari pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait. |
| 3. | Disposisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak dari sikap dan perilaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesungguhan untuk mewujudkan pelaksanaan sister |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Terwujudnya nilai dalam kebijakan, dan 3. Sikap diantara pelaksana terhadap nilai yang dibentuk. | <p>village dalam penanggulangan bencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat nilai-nilai moral yang mampu dibawa dan diterapkan pada saat pelaksanaan program sister village. 3. Terdapat respon antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan adanya konsistensi keberlanjutan program |
| 4. | Birokrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Interaksi yang terjalin antara pemangku kebijakan dengan pelaksana dan pengguna 2. Adanya operasionalisasi yang mendukung keberlangsungan implementasi kebijakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aksi timbal balik respon yang diberikan antara pemangku kebijakan dengan pelaksana dan pengguna 2. Adanya standar operasionalisasi untuk menjaga kewewenangan yang ada deprogram sister village. |

1.8 Kerangka Berfikir

Bagan 1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk peneliti yang ingin melakukan

penelitian isu tertentu secara mendalam dan terperinci untuk mendapatkan dan mengkaji fenomena sosial kemasyarakatan terkait program yang dijalankan.

1.9.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan penelitian format deskriptif. Penelitian format deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu¹⁹. Dalam penelitian kuantitatif juga terdapat model – model desain penelitian, hanya desain tersebut tidak jauh berbeda dengan desain – desain penelitian kualitatif. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Menggambar secara deskriptif bagaimana kinerja serta proses *sister village* dalam penanggulangan bencana gunung meletus di Kabupaten Magelang

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdiri atas narasumber yang dapat memberikan keterangan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu pernyataan oleh narasumber. Penelitian ini menggunakan subjek penelitiannya adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau pengalaman dalam pelaksanaan system kebencanaan yang Bernama *sister village* di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan data di lapangan yang telah ada tujuannya²⁰.

Subjek yang peneliti fokuskan dengan melakukan wawancara kepada :

¹⁹ Burhan Bungin, 2013. “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”. Jakarta : Prenada Media Grup.Hlm.48

²⁰ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

1. Pihak BPBD Kabupaten Magelang, dalam hal ini subjek utamanya adalah ibu Muflichah Roychani, S.T., M.M sebagai Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Magelang.
2. Pihak BPBD Kabupaten Magelang, dalam hal ini adalah bapak Kristian Hadiwijaya, S.T. sebagai Kepala Pusdalop BPBD Kabupaten Magelang.

1.9.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penulis mengumpulkan data primer berusaha dengan melakukan wawancara dengan melakukan observasi terhadap aktor-aktor BPBD dalam upaya menjalankan program *sister village*. Wawancara sendiri memiliki artian pengambilan data dengan menggunakan metode pertanyaan yang sudah tersusun untuk mendalami keterangan lebih lanjut. Perlu adanya observasi dengan cara mengamati perilaku actor dilokasi penelitian. Dengan demikian aka ada jawaban yang diperoleh meliputi semua nilai variable yang lengkap dan terstruktur sehingga data yang diperoleh hasil wawancara menjadi data pendukung didalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Penulis berupaya menjelaskan interpretasi penulis dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti jurnal ilmiah,buku,surat kabar online, laporan publikasi, undang- undang, konvensi internasional, dan data-data lain yang telah terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang berkaitan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan untuk penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis memberikan suatu pertanyaan kepada narasumber terkait dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Newman (2013) wawancara didefinisikan sebagai pertemuan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun narasumber penelitian untuk berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapatkan baik dan akurat. Metode yang akan digunakan dalam wawancara dengan cara bertemu langsung dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian terkait pelaksanaan system kebencanaan *sister village* di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Magelang.

2. Observasi

Observasi yaitu proses pelaksanaan pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pengamatan dilokasi penelitian yang dapat dibedakan menjadi seorang observasi dengan partisipasi dan non partisipasi (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, penulis melaksanakan observasi non partisipasi untuk mendapatkan data dengan cara turun dilokasi langsung untuk mengamati kegiatan narasumber di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang dapat berbentuk dari tulisan, gambar dan karya. Bentuk tulisan yang dimaksud disini berupa catatan harian, *life historys*, peraturan, kebijakan dan lainnya. Jika berbentuk gambar sendiri yaitu foto, sketsa, dan lainnya. Sedangkan untuk bentuk karya seperti patung, film, dan lainnya. Dokumentasi yang digunakan adalah data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Magelang, serta berbagai jurnal ataupun literasi yang terkait dengan penelitian.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dapat dimulai dengan mendapatkan keseluruhan data dari proses wawancara dan pengumpulan sumber yang ada, kemudian dilakukan penyusunan data-data dan struktur jawaban secara urut, kemudian diambil garis besar dari keseluruhan proses pengumpulan data, menyimpulkan kemudian dijelaskan kembali sesuai rinciannya. Proses menyusun sistematis data yang diperoleh dengan hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori yang kemudian menjelaskan data mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.